

LAPORAN BULANAN



BULAN OKTOBER TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	11
BAB III. TELAAHAN	19
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	20

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprass di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



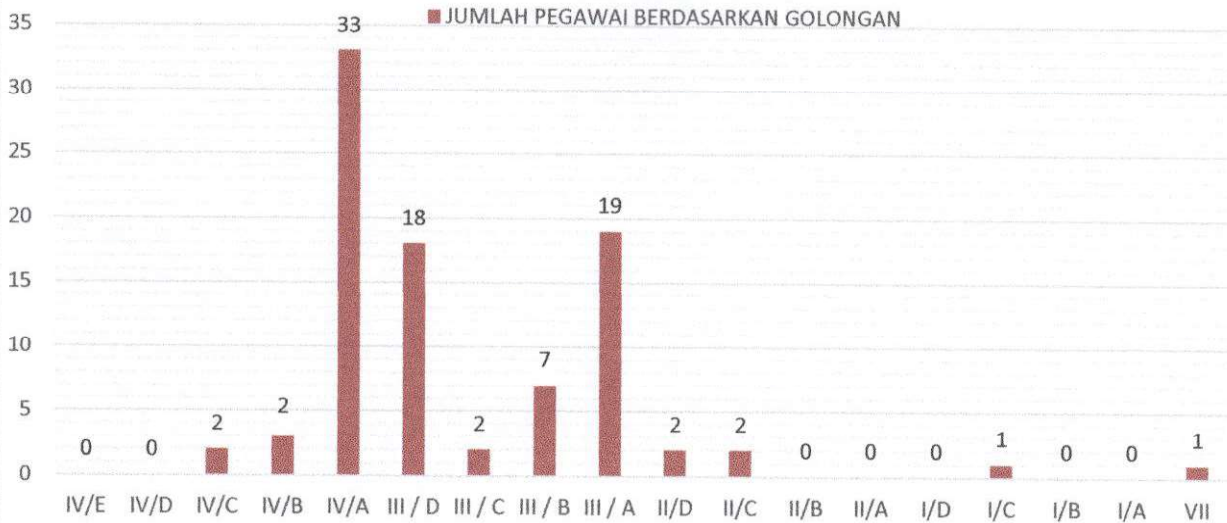
- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 87 Orang (Sembilan Puluh) PNS, 2 Orang CPNS, 1 Orang PPPK (P3K) dan PPNPN berjumlah 11 Orang, yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 63 orang dan Perempuan 24 Orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Haristov Aszadha, SH	Hakim PTUN Serang	Hakim PTUN Jakarta	TMT 22 Oktober 2024

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

MUTASI Keluar Wilayah :

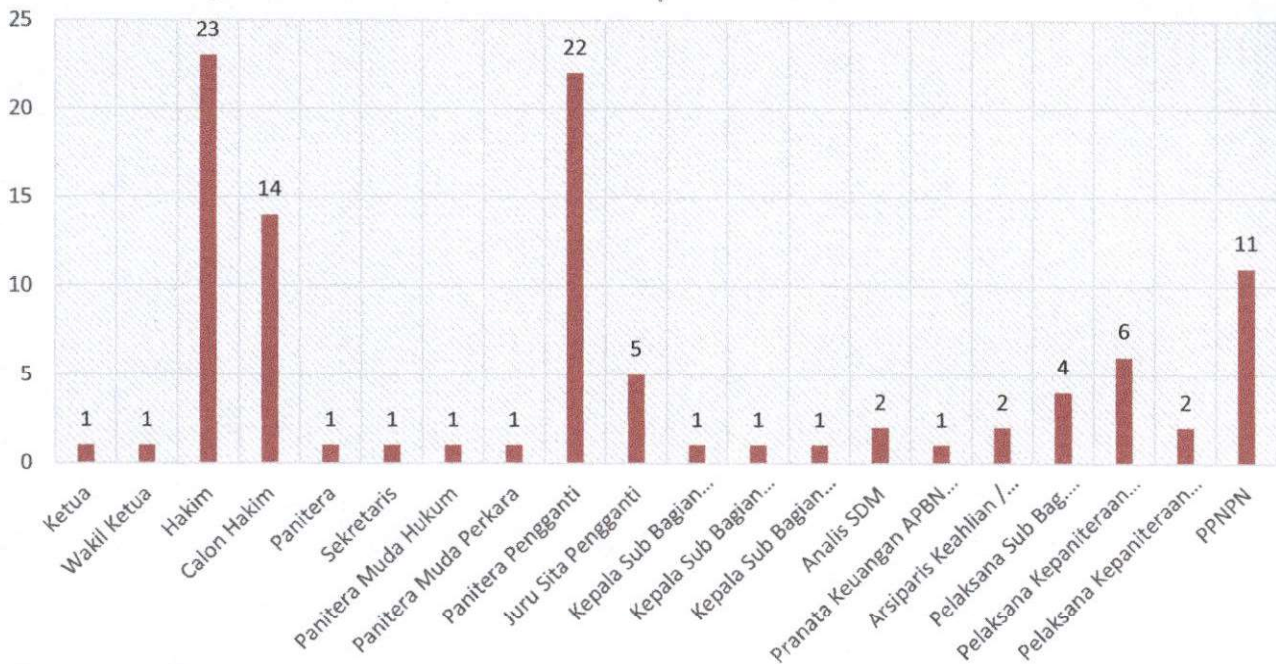
NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Pelantikan / Pengangkatan Jabatan Baru :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	87	0	0	87
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	34	0	0	34
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	2	0	0	2
4	Kepaniteraan Muda Perkara	223	0	0	223
5	Kepaniteraan Muda hukum	27	0	0	27
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					373

Surat Masuk

NO	SUB.BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1		MAHKAMAH AGUNG RI	1	44	0	45
2		PT.TUN-JAKARTA	3	0	0	3
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	1	0	0	1
4	PERSURATAN	DIRJEND.BADIMILTUN	1	0	0	1
5		KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0
6		PERKARA/LAIN-LAIN	44	0	0	44
7		UMUM/LAIN-LAIN	8	0	0	8
TOTAL					102	

2) Tata Kearsipan :

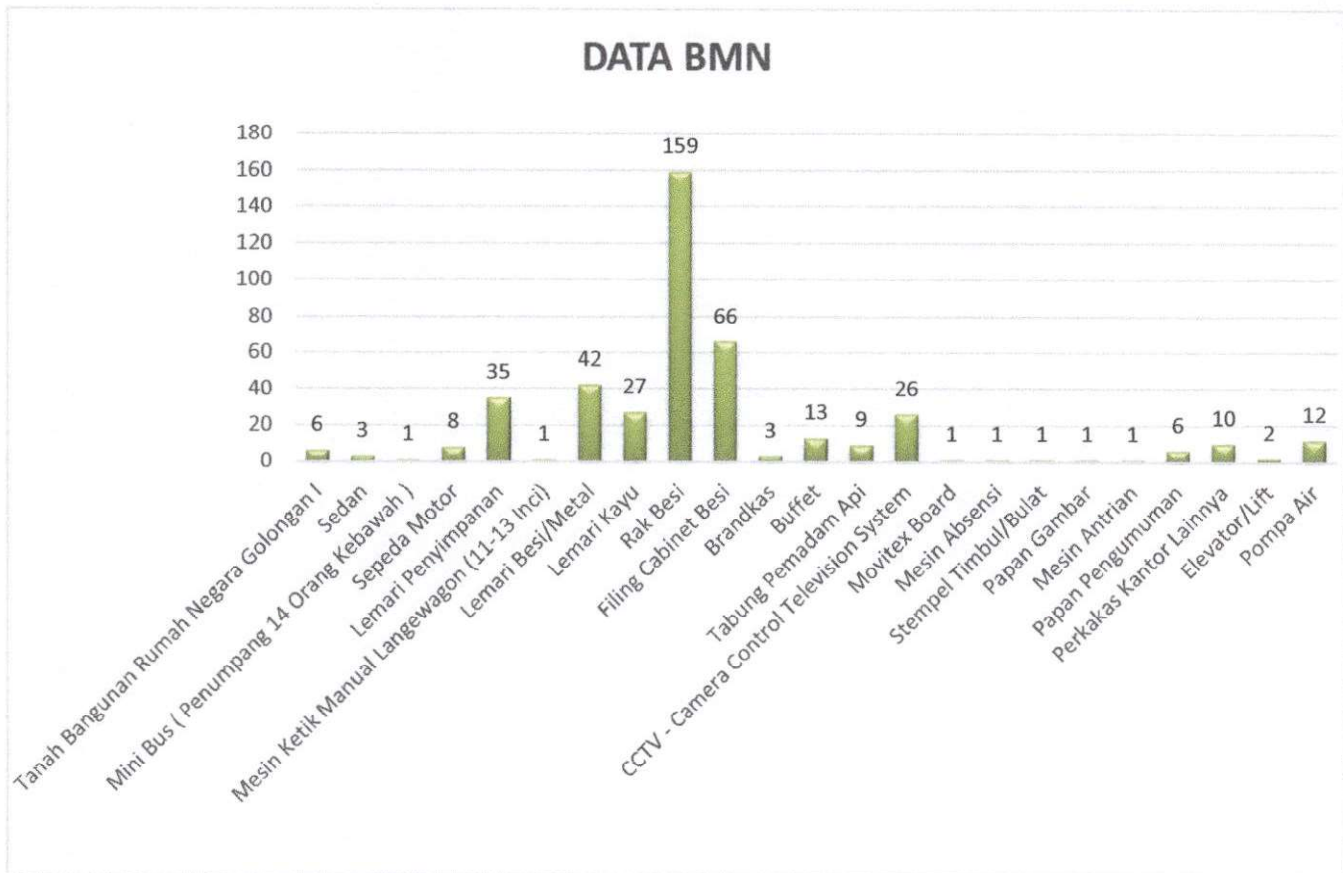
Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

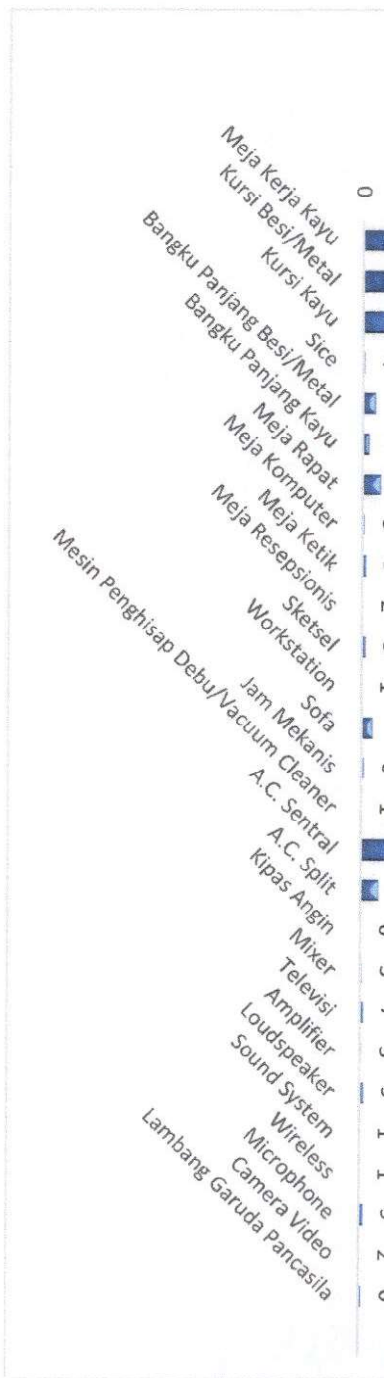
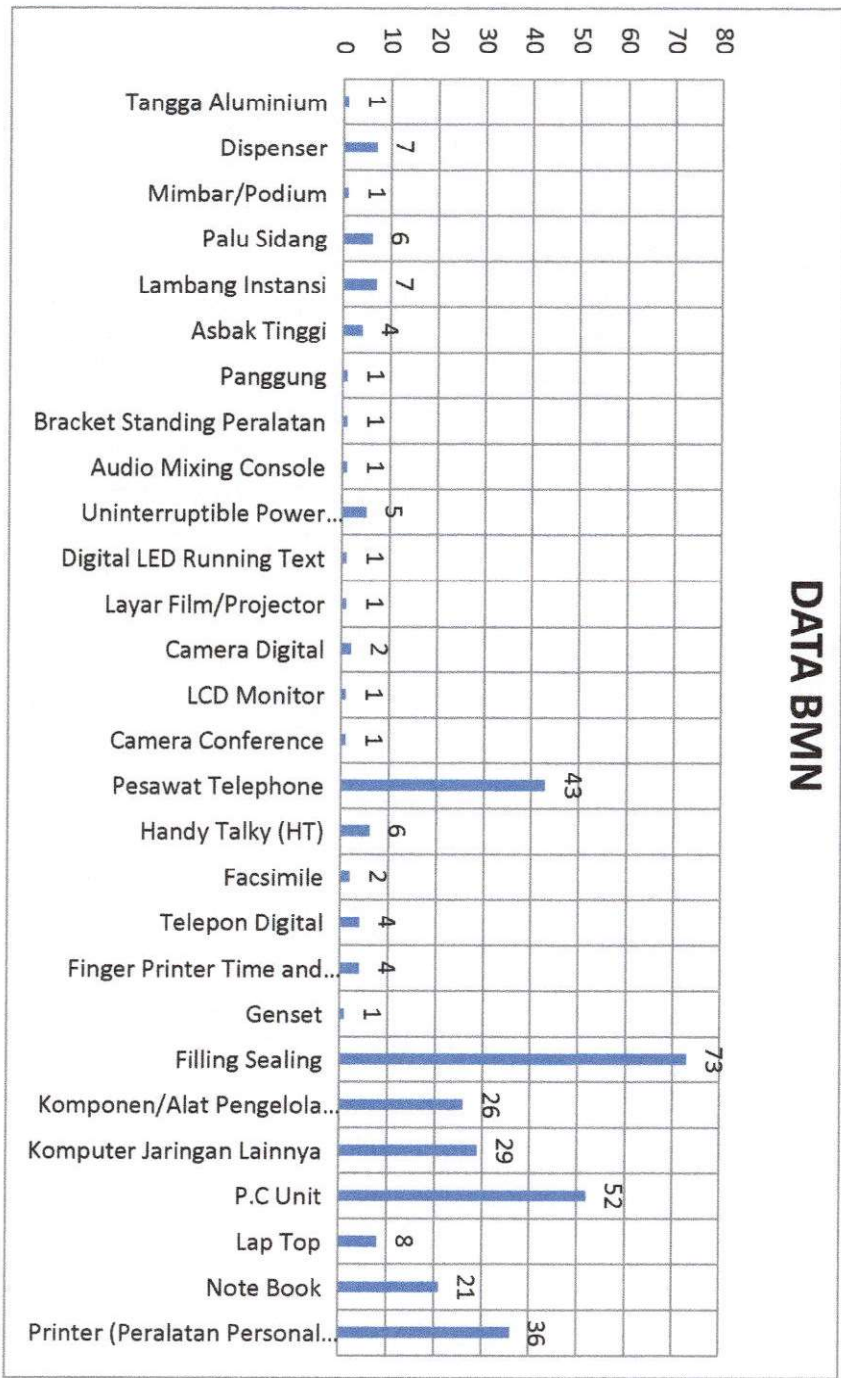
3) Inventaris dan Persediaan :

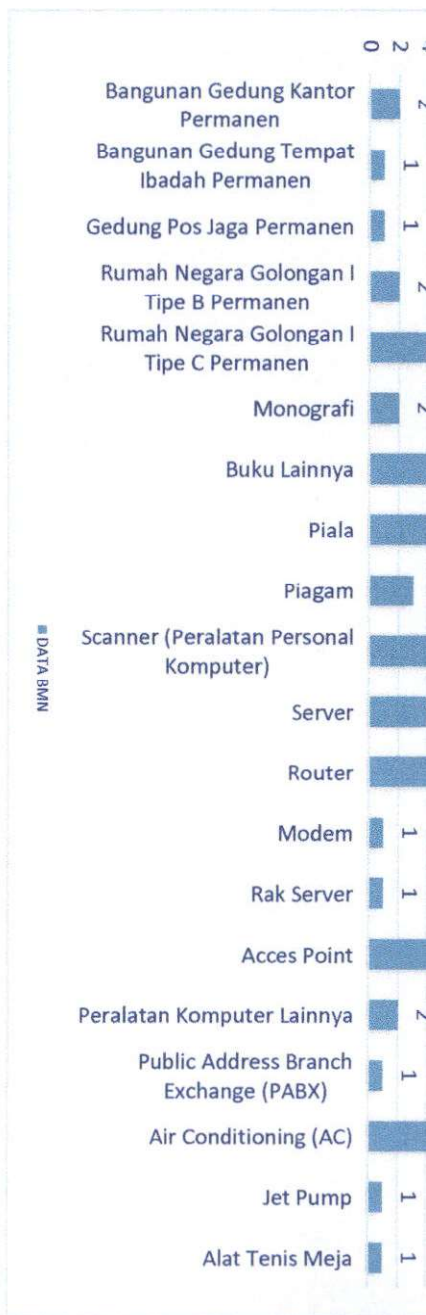
Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

Untuk bulan Oktober Tahun 2024 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :



DATA BMN





Untuk Bulan Oktober 2024 Perpustakaan Pengadilian Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : OKTOBER 2024

SATKER / KODE SATKER : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 No. DIPA : DIPA-005.05.2.526733/2024

No.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI		SISA DANA		KET
			PAGU DIPA	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/4)	9 = (5+7)	10 = (9/9)	11 = (4-9)	12 = (11/4)	13
003	52	BELANJA PELAYANAN	11.385.206.000	11.006.753.040	87%	922.033.356	7%	12.307.239.396	91%	1.078.966.604	9%	
1066	521111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.251.670.000	4.270.888.542	89%	350.438.210	7%	4.621.517.752	91%	1.356.349.852	9%	
EBA 994	521115	Belanja Pembelian Gaji PNS	62.000	55.644	8%	3.973	6%	67.617	9%	4.881	7%	
001A	521121	Belanja Tunj. Suamistri PNS	370.849.000	317.079.662	85%	25.546.896	7%	347.616.558	92%	28.202.441	8%	
521122	Belanja Tunj. Anak PNS	120.197.000	102.462.884	85%	8.213.636	7%	110.676.520	92%	9.520.480	8%		
521123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5.899.599.000	4.927.463.000	83%	399.449.000	7%	5.326.912.000	90%	447.687.000	8%		
521124	Belanja Tunj. Organisasi PNS	43.760.000	34.560.000	79%	2.880.000	7%	37.440.000	86%	5.760.000	13%		
521125	Belanja Tunj. PPH PNS	3.200.000.000	2.627.463.000	82%	399.449.000	7%	3.026.912.000	94%	447.687.000	8%		
521126	Belanja Tunj. Hewan PNS	724.000.000	720.819.800	100%	44.036.200	6%	764.856.000	100%	80.813.500	6%		
521129	Belanja Uang Makan PNS	257.525.000	223.698.200	87%	35.032.500	7%	292.730.700	92%	18.394.300	7%		
521131	Belanja Tunjangan Umum PNS	1.000.513.000	515.156.000	51%	64.205.000	6%	579.361.000	58%	421.152.000	47%		
521135	Belanja Tunjangan Khusus PNS	84.654.000	57.075.000	67%	4.980.000	6%	62.055.000	73%	22.599.000	27%		
521611	Belanja Gaji Pokok PPPK	93.600.000	91.891.400	98%	2.858.600	7%	94.750.000	99%	2.850.000	7%		
521613	Belanja Pembelian Jasa PPPK	7.000	800	11%	60	1%	7.060	9%	6.124	8%		
521621	Belanja Tunjangan Jabat PPPK	3.704.000	3.111.000	84%	0	0%	3.111.000	84%	3.704.000	100%		
521622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.880.000	0	0%	0	0%	0	0%	1.880.000	100%		
521624	Belanja Tunj. Organisasi PPPK	4.960.000	4.200.000	84%	150.000	3%	4.350.000	88%	540.000	7%		
521625	Belanja Tunj. Hewan PPPK	4.054.000	39.600	1%	22.410	0%	4.076.410	1%	3.112.500	7%		
521628	Belanja Uang Makan PPPK	8.500.000	6.164.000	72%	560.000	7%	6.724.000	80%	1.680.000	20%		
002	52	BELANJA BARANG	2.987.452.000	2.007.223.757	67%	305.587.213	11%	2.312.810.970	84%	474.641.030	16%	
A	Belanja Bahan											
1066	521113	Belanja Bahan	736.744.000	526.680.000	71%	55.898.400	8%	614.548.400	83%	111.736.000	15%	
521115	Belanja Sewa Operasional Lainnya	92.437.000	75.911.889	82%	6.558.819	7%	82.470.708	89%	36.925.292	40%		
EBA 994	521120	Belanja Pembelian Barang Konsumsi	95.400.000	84.901.387	89%	6.917.500	7%	91.818.887	96%	21.462.113	23%	
001A	521121	Belanja Bahan	720.600.000	514.081.766	71%	252.261.000	35%	466.342.766	65%	4.907.471	1%	
521124	Belanja Pembelian Surat Dinas dan Papan	4.800.000	1.174.000	24%	256.848	5%	4.543.152	95%	3.211.800	67%		
EBA 994	521125	Belanja Hewan Operasional Satuan Kerja	74.667.000	55.141.200	74%	4.830.000	6%	79.497.200	100%	14.893.000	19%	
521131	Belanja Langganan Internet	6.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	6.000.000	100%		
521134	Belanja Langganan Air	6.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	6.000.000	100%		
C	Pengembangan Kapasitas											
521111	Belanja Pendidikan dan Pelatihan dan Sertifikasi	999.714.000	580.771.220	58%	44.520.000	5%	614.291.220	61%	385.423.000	39%		
521113	Belanja Penelitian dan Pengembangan dan Riset dan Pengabdian Masyarakat	61.000.000	44.114.000	72%	0	0%	44.114.000	72%	64.886.000	100%		
521127	Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Sertifikasi	999.660.000	279.520.521	28%	17.074.620	2%	246.595.141	25%	41.301.879	4%		
D	Operasional Lainnya											
521112	Belanja Keperluan Kantor	46.710.000	26.166.000	56%	0	0%	26.166.000	56%	20.544.000	44%		
524111	Belanja Perjalanan Dinas	39.200.000	9.108.500	23%	9.860.000	25%	49.068.500	125%	40.711.800	104%		
524113	Belanja Perjalanan Dalam Kota	15.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	15.000.000	100%		
521141	Belanja Sewa	303.960.000	4.363.900	1%	59.910.000	2%	64.273.900	21%	129.350.000	42%		
			16.172.658.000	11.221.980.799	82%	1.277.690.315	8%	14.449.671.114	89%	1.728.986.886	11%	



Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : OKTOBER 2024

SATKER / KODE SATKER : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 No. DIPA : DIPA-005.05.2.526733/2024

No.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI		SISA DANA		KET
			PAGU DIPA	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7/4)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11 = (4-9)	12 = (11/4)	13
	52	BELANJA BARANG	63.660.000	35.317.000	55%	7.360.000	12%	42.677.000	67%	20.983.000	33%	
AFA.003.05.1A.52	521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	27.600.000	13.200.000	48%	2.560.000	9%	15.760.000	57%	11.840.000	43%	
GCA.001.05.1A.52	521211	Belanja Bahan (ATK dan Pemeliharaan Berkas perkara)	3.060.000	1.950.000	64%	0	0%	1.950.000	64%	1.110.000	36%	
GCA.001.05.1A.52	521211	Belanja Bahan (ATK Posbakam)	4.200.000	3.367.000	80%	0	0%	3.367.000	80%	833.000	20%	
GBA.001.05.1A.52	522131	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Belanja cara Konsumsi)	28.800.000	16.800.000	58%	4.800.000	17%	21.600.000	75%	7.200.000	25%	
			63.660.000	35.317.000	55%	7.360.000	12%	42.677.000	67%	20.983.000	33%	



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

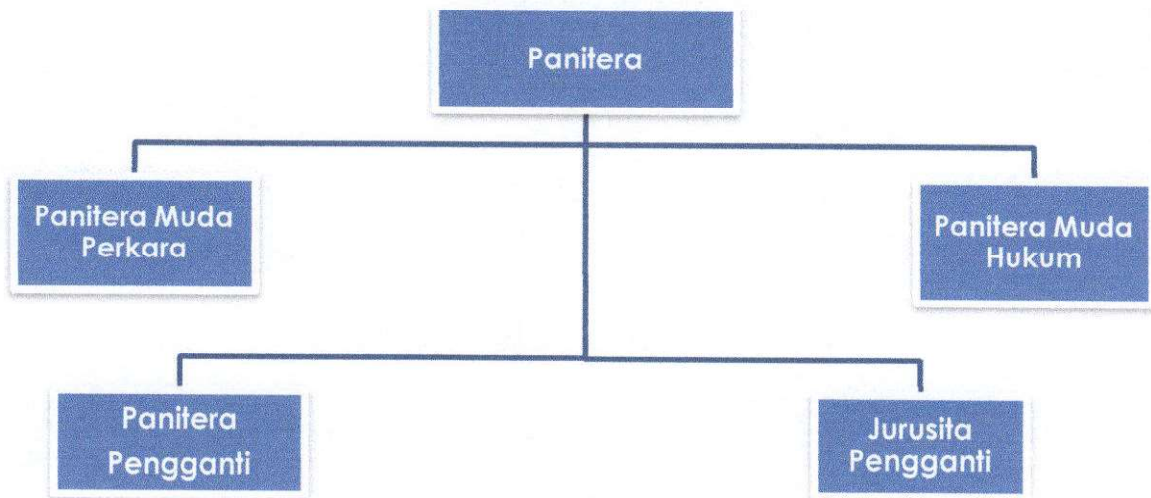
- a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Oktober 2024 agenda.
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

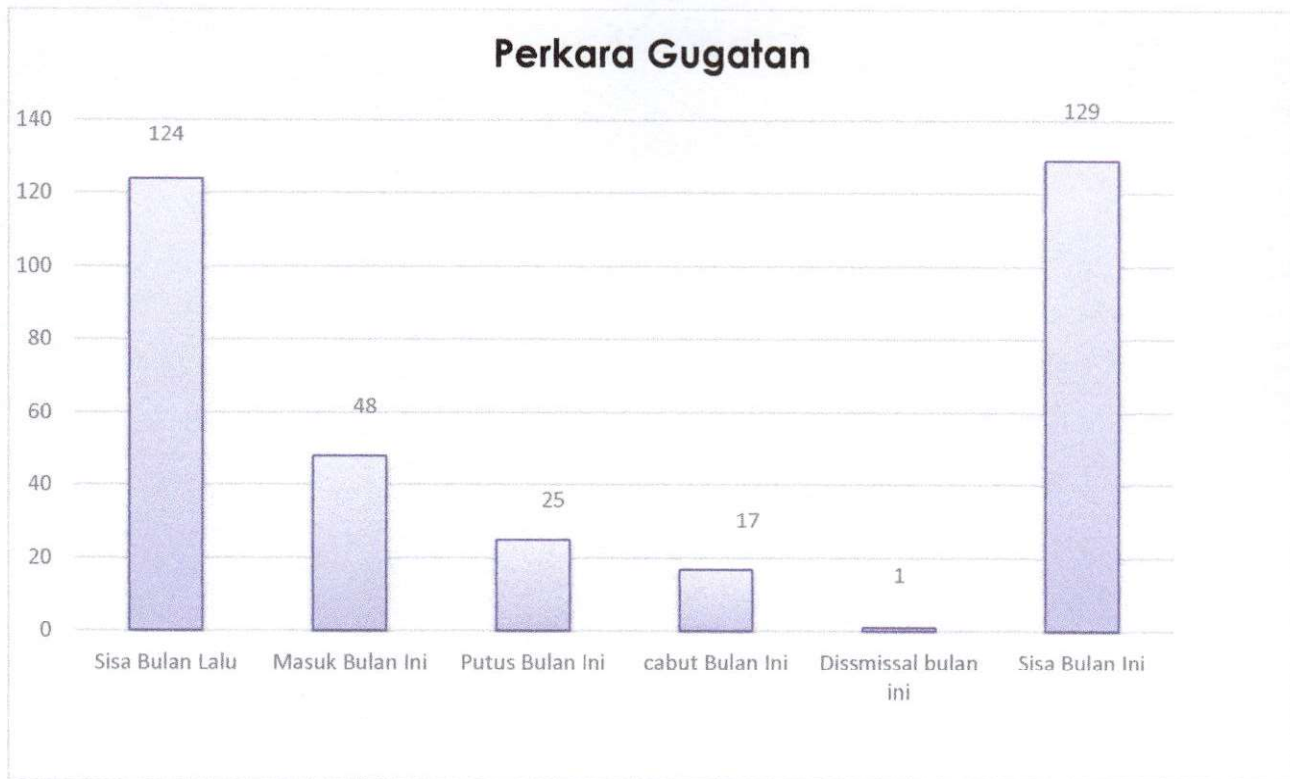
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Keadaan Perkara

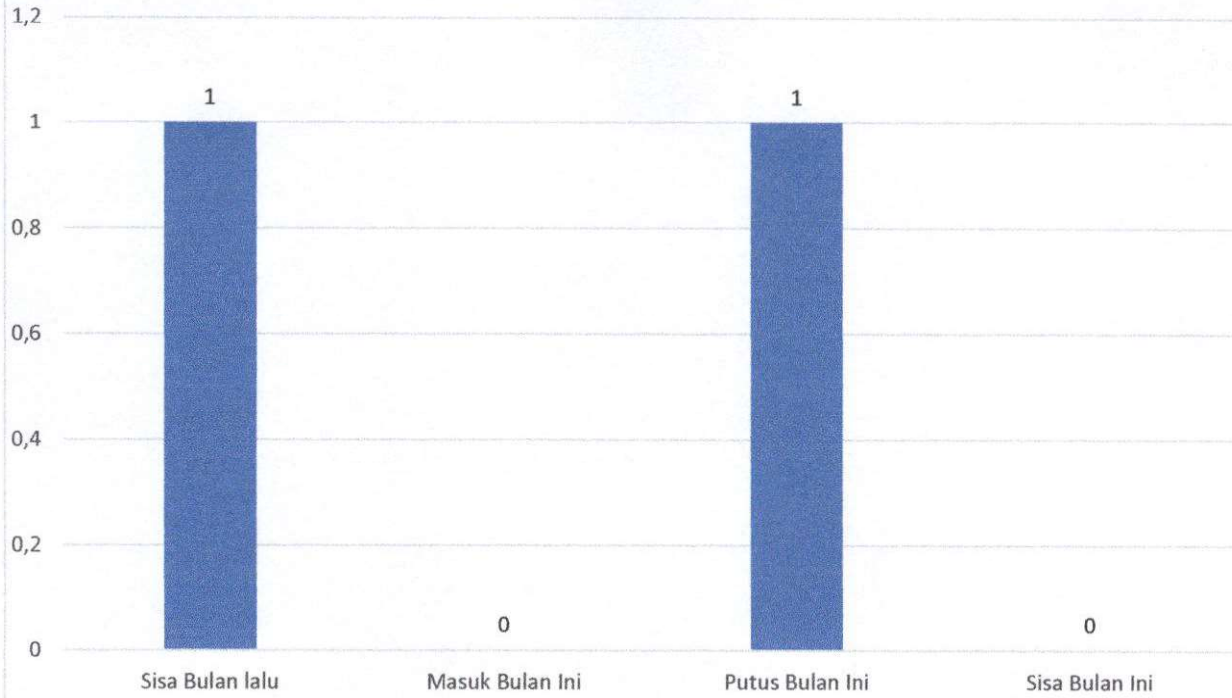


Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)

$$17 + 1 + 25 = 43 \text{ Perkara (1 putusan PLW)}$$

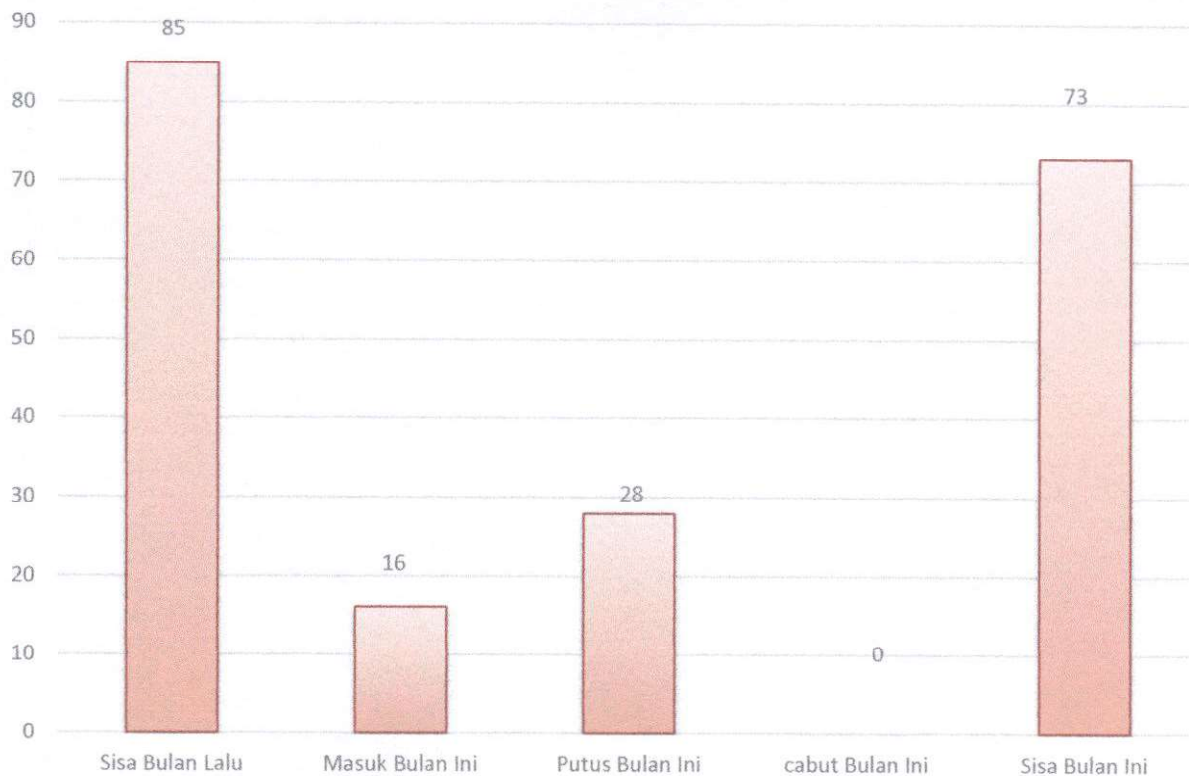
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

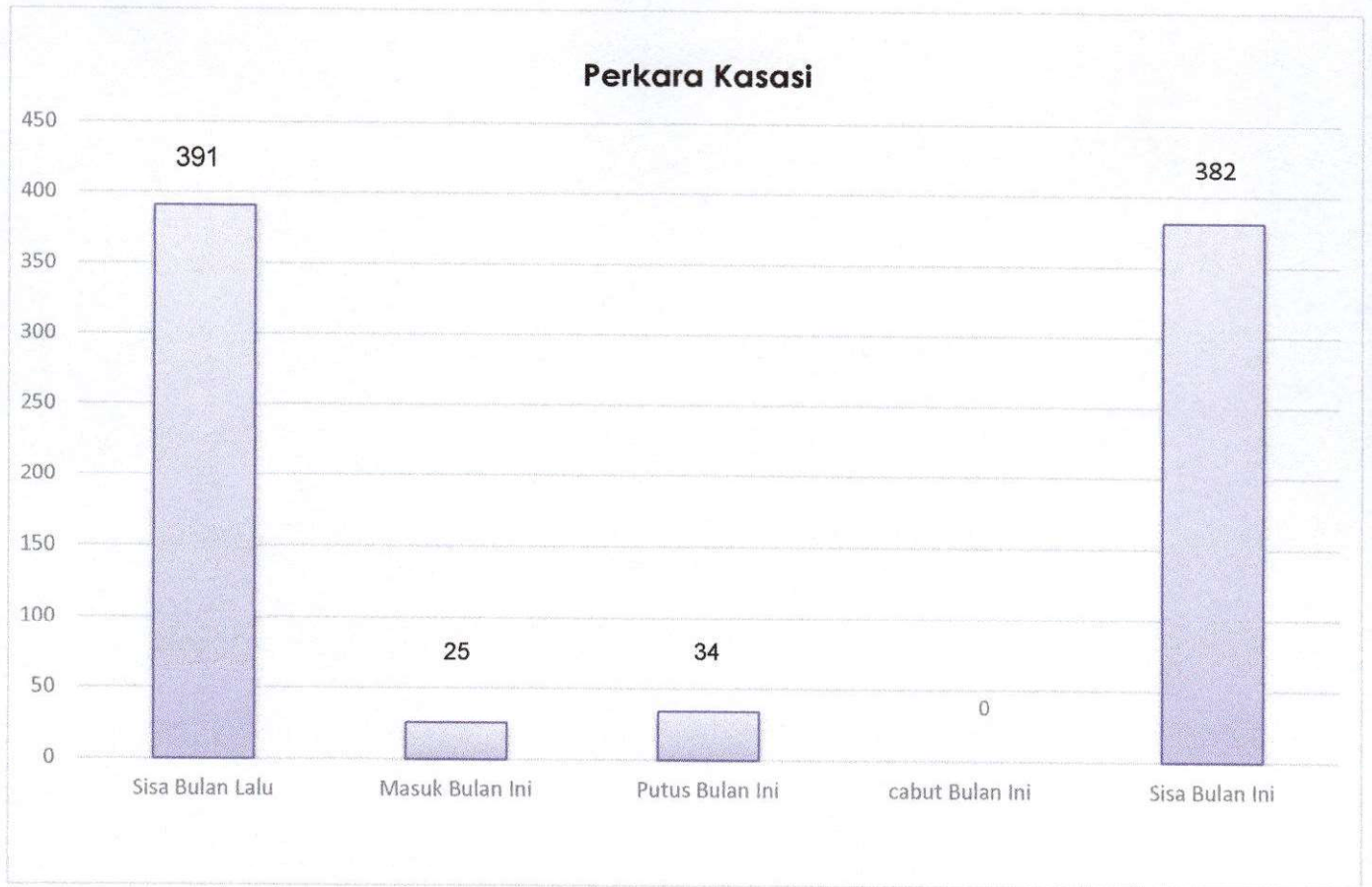


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Oktober 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN OKTOBER TAHUN 2024

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara			Pengugat			Tergugat			Perlawanan			Putusan			Permohonan			Terima Berkas			Keterangan				
			Masuk	Dokuit	Jumlah	Berdasarkan	Berdasarkan	Berdasarkan	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik	Ditertarik					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A GUGATAN																												
1	Pertanahan	13	12	4	21	11	1	1	11	-	-	-	-	1	5	1	7	14	5	4	-	-	7	-	-	-	-	(2 PRK MASUK PLW)
2	Kepegawain	6	2	-	8	2	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	3	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
3	Perjanjian	23	12	1	34	-	12	12	-	5	-	-	-	2	-	1	3	11	23	2	7	-	-	7	1	-	-	
4	Lingkungan Hidup	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Badan Hukum/ Parpol	13	15	-	28	1	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	5	-	-	7	1	-	-	
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kotenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	6	6	-	12	6	-	6	-	-	-	-	-	3	-	1	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	29	7	-	36	2	5	7	-	-	-	-	-	2	2	1	2	7	29	5	5	2	-	10	8	-	-	
17	Merek	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Lain Lain	38	19	1	56	16	3	15	4	4	-	-	-	1	3	7	-	15	41	5	8	1	-	11	2	-	-	
JUMLAH		129	75	6	198	38	37	60	15	10	-	-	-	6	10	15	7	48	150	18	31	5	-	42	12	-	-	

MENGETAHUI



Jakarta, 31 OKTOBER 2024



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Oktober 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN OKTOBER TAHUN 2024

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 31 OKTOBER 2024



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan Upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024. Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 dan memperhatikan Surat Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia Nomor : B-PP.00.00/10.18.2/MENPORA/X/2024. Upacara dilaksanakan pukul 07.30 WIB di Halaman depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bertindak sebagai Pembina Upacara yaitu Ibu Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. Upacara diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat struktural/Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan, seluruh ASN, PPPK dan PPNPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 87 ASN, 2 Orang CPNS, 11 PPNPN, dan 1 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 5 (lima) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Oktober 2024 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran untuk renovasi rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).
- Mohon agar diberikan Anggaran Belanja Modal untuk keperluan Pengadaan Scanner untuk Panitera Pengganti dan Kepaniteraan.

Jakarta, 08 November 2024



Mengetahui
Ketua,





Genan Pratiwi, SH, MH
NIP. 197210261992032001

Sekretaris,









Giri Wahyu Utomo, S.Kom
NIP. 198403262009041004

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		




Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Komponen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 	2	Honda Supra X 125 D
				
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 	4	Honda Supra X 125 D
				

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D
				
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D
	